

KUALITAS SITUS WEBSITE PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN DI PULAU FLORES NUSA TENGGARA TIMUR

Oleh :

Teresa Ona Delang^{1*}

Magister Akuntansi, Universitas Esa Unggul Jakarta, Indonesia

Email : teresaonadelang2015@gmail.com

Agus Munandar²

Magister Akuntansi, Universitas Esa Unggul Jakarta, Indonesia

Email : agus.munandar@esaunggul.ac.id

Info Artikel :

Diterima : 26 Okt 2021

Direview : 29 Okt 2021

Disetujui : 01 Nov 2021

Co-Author* : teresaonadelang2015@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to find the quality of district government websites on Flores Island, East Nusa Tenggara, namely the districts of Manggarai, West Manggarai, East Manggarai, East Flores, Ende, Nagekeo, Ngada and Sikka. This type of research uses descriptive - interpretive, namely research that describes, interprets and describes problems and makes decisions from the results of website quality. Documentation is a data collection method used in the form of website data from InfoASN.id using tools provided by Web Dev / Measure page quality. The results of this study indicate that the average for Performance is 57%. Accessibility 74% . Best Practices 69% which is included in the category of moderate quality. As for SEO, it is at the level of quality assessment with an average percentage of 92%.

Keyword : good governance, e-government, website

ABSTRAK

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui kualitas website pemerintahan kabupaten di Pulau Flores Nusa Tenggara Timur yaitu Kabupaten Manggarai, Manggarai Barat, Manggarai Timur, Flores Timur, Ende, Nagekeo, Ngada dan Sikka. Jenis penelitian ini menggunakan deskriptif – interpretif yaitu penelitian yang mendeskripsikan, menginterpretasikan serta menguraikan permasalahan dan mengambil keputusan dari hasil kualitas *website*. Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data yang dipakai yakni berupa data website dari InfoASN.id dengan menggunakan alat bantu yang disediakan Web Dev / Measure page quality. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rata-rata untuk *Performance* adalah 57%. *Accessibility* 74% . *Best Practices* 69% yang mana masuk dalam kategori cukup berkualitas. Sedangkan untuk SEO berada pada tingkat penilaian berkualitas dengan persentase rata-rata 92%.

Kata Kunci: good governance, e-government, situs web

PENDAHULUAN

Salah satu upaya untuk bisa tercapainya pemerintahan yang baik (*good governance*) yakni kemudahan dalam mendapatkan informasi *public*. Perkembangan suatu teknologi informasi yang mana semakin cepat, sehingga pemerintahan memanfaatkan teknologi tersebut untuk memberikan akses terkait informasi pelayanan *public* terhadap masyarakat. Dalam menyediakan pelayanan *public* yang lebih baik, pemerintahan harus menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan pemerintahan, sehingga informasi yang telah disediakan bisa mempermudah masyarakat atau pihak lain dalam mengakses terkait informasi yang diperlukan. Salah satu contoh eksploitasi dari teknologi informasi dalam mewujudkan *good governance* yakni dengan adanya *e-government*.

Implementasi *e-government* diatur dalam Intruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 mengenai suatu Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-government*. Dimana terdapat beberapa aspek yang harus terpenuhi dalam *e-government* yakni aspek efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas pemerintahan. Perkembangan *e-government* ini adalah upaya dalam meningkatkan kualitas layanan *public* yang diharapkan dapat mewujudkan keinginan pemerintah untuk mendorong Indonesia khususnya masyarakat dalam mendapatkan informasi dan

layanan *public* dimanapun dan kapanpun yang dapat dilakukan selama 24 jam serta menyampaikan aspirasi-aspirasi dari masyarakat. Dengan adanya penerapan tersebut, masyarakat akan lebih produktif, menghemat biaya, serta lebih baik dari cara sebelumnya. Langkah awal dalam implementasi *e-government* yakni penggunaan *website*. Setiap instansi pemerintahan disyaratkan agar menyajikan informasi yang umum maupun terkait dengan tupoksi dari instansi masing-masing melalui *website* pemerintahan daerah tersebut. Menurut rancangan Peraturan Kominfo Tahun 2017, minimal isi dari *website* terdiri dari fitur, transparansi, akuntabilitas dan efektivitas serta efisiensi.

Di Indonesia, semua provinsi serta kabupaten pada umumnya sudah memiliki *website* pemerintahan. Pada penelitian sebelumnya mengevaluasi kinerja *website* pemerintahan pada 33 provinsi di Indonesia dan penelitian ini membahas kualitas *website* pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) khususnya pada pemerintahan kabupaten di Pulau Flores yakni Kabupaten Manggarai, Manggarai Barat, Manggarai Timur, Flores Timur, Ende, Nagekeo, Ngada dan Sikka. Pemerintahan Daerah NTT sudah menerapkan *e-government*. Hal ini dibuktikan dengan kepemilikan *website* resmi dari masing-masing kabupaten. Berikut alamat *website* pemerintahan kabupaten di Provinsi NTT :

Tabel 1. Alamat *Website* Pemerintahan Kabupaten di NTT

No.	Nama Kabupaten	Alamat <i>Website</i>
1	Kupang	kupangkab.go.id
2	Kota Kupang	kupangkota.go.id
3	Timor Tengah Selatan	ttskab.go.id
4	Timor Tengah Utara	ttukab.go.id
5	Belu	belukab.go.id
6	Alor	alorkab.go.id
7	Flores Timur	florestimurkab.go.id
8	Sikka	sikkakab.go.id
9	Ende	endekab.go.id
10	Ngada	ngadakab.go.id
11	Manggarai	manggaraikab.go.id
12	Manggarai Barat	manggaraiarakab.go.id
13	Manggarai Timur	manggaraitimurkab.go.id
14	Sumba Barat	sumbabarakab.go.id
15	Sumba Timur	sumbatimurkab.go.id

16	Kabupaten Sumba Tengah	sumbatengahkab.go.id
17	Kabupaten Sumba Barat Daya	sbdkab.go.id
18	Rote Ndao	rotendaokab.go.id
19	Lembata	lembatakab.go.id
20	Nageko	nagekeokab.go.id
21	Sabu Raijuua	saburaijuakab.go.id
22	Malaka	malakakab.go.id

(Sumber : InfoASN.id)

Provinsi NTT adalah salah satu provinsi yang berlokasi di sebelah tenggara Indonesia yang mana pada bagian Utara adalah Laut Flores, kemudian Samudra Hindia merupakan batasan sebelah selatan, sebelah timur yakni Timor Leste dan Provinsi Nusa Tenggara Barat berada pada bagian Barat. NTT termasuk salah satu provinsi berbentuk kepulauan yang mana terdapat 1.192 pulau, dimana banyak pulau tidak memiliki penghuni. Terdapat 5 pulau besar di NTT yang disebut dengan 'Flobamorata' yang mana mencakup Pulau Flores, Sumba, Timor, Alor dan Lembata (<https://nttprov.go.id/>). Provinsi NTT memiliki banyak potensi pariwisata yang bagus dan kini semakin mendunia serta perkembangan teknologi yang semakin dinamis, mengharuskan semua lini terutama pemerintahan, harus mengikuti perkembangan tersebut dan ditambah era pandemik ini, semua aktivitas dibatasi dan dialihkan menjadi aktivitas online, sehingga pemerintahan harus meningkatkan kualitas situs website yang telah ada agar public dengan mudah mengakses website pemerintahan dan lebih mudah mendapatkan informasi yang diperlukan. Dari fenomena tersebut, peneliti melakukan penelitian dengan judul "Analisis Kualitas Situs Website Pemerintahan Daerah Kabupaten Di Pulau Flores Nusa Tenggara Timur". Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa menjadi kriteria pemerintah daerah untuk mengembangkan *e-government*.

KAJIAN PUSTAKA

Good Governance

Definisi *Good governance* berdasarkan World Bank adalah suatu cara kekuasaan atau kewenangan Negara dalam mengelola sumber daya ekonomi dan sosial untuk pembangunan masyarakat. Ataupun penyesuaian dari suatu *sector public* adalah proses untuk menciptakan *good governance* yang bisa dihasilkan dengan suatu pelayanan *public*. (Cheisvianny dkk, 2018). *Good Governance* merupakan suatu pengelolaan organisasi dengan baik

berdasarkan prinsip-prinsip keadilan, keterbukaan serta dapat dipertanggungjawabkan untuk mencapai tujuan suatu organisasi. Untuk mewujudkannya diperlukan suatu penerapan dan pengembangan sistem pertanggungjawaban yang jelas, terukur, dan tepat agar kinerja pemerintahan dan pembangunan bisa berlangsung dengan bersih, tanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (Adriana, 2017).

Adapun beberapa Prinsip Dasar *Good Governance* (Adriana, 2017), antara lain :

1. *Public Participation*
Setiap masyarakat memiliki hak dalam membuat keputusan, baik dalam bentuk langsung atau mewakili kepentingan melalui intermediasi institusi terlegitimasi.
2. *Rule of law*
Aturan hukum harus memiliki sifat yang setimpal dan dilakukan tanpa memandang suku, agama, budaya, dan ras untuk hak asasi manusia.
3. *Transparency*
Prinsip ini dibuat berdasarkan kebebasan arus informasi. Dimana suatu informasi bisa diterima secara langsung bagi yang memerlukannya.
4. *Responsiveness*
Didalam lembaga-lembaga serta prosesnya agar dapat melayani setiap *stake-holders* yang membutuhkan informasi.
5. *Consensus Orientation*
Suatu *Good governance* dapat menjadi penghubung keentingan untuk bisa mendapatkan pilihan yang baik bagi kepentingan yang lebih besar dalam prosedur ataupun kebijakan.
6. *Equity*
Setiap warga negara memiliki suatu kesempatan untuk menjaga serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
7. *Effectiveness and Efficiency*
Dalam suatu lembaga dapat menghasilkan *good governance* berdasarkan apa yang sudah sesuai dengan sumber-sumber yang telah tersedia atau yang telah diharapkan.

8. *Accountability*
Suatu bentuk pertanggungjawaban kepada *public* atau masyarakat dari setiap aktivitas yang telah dilakukan.
9. *Strategic vision*
Pimpinan atau pengurus suatu organisasi *public* wajib memiliki perspektif *good governance* serta peningkatan yang lebih baik.

E-government

E-government merupakan suatu alat pemerintahan yang menggunakan teknologi informasi untuk meningkatkan pelayanan bagi warga Negara, lembaga pemerintahan maupun lembaga swasta yang saling berinteraksi (Wati, 2019). Implementasi *e-government* tertuang di dalam Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 mengenai suatu Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-government*. Dimana terdapat beberapa aspek yang harus terpenuhi dalam *e-government* yakni aspek transparansi, efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas pemerintahan.

Strategi serta kebijakan nasional pengembangan *e-government* tertuang pada Instruksi Presiden No.3 tahun 2003 yang menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mengupayakan fungsi pemerintahan berbasis teknologi informasi. *E-Government* adalah implementasi penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang mencapai suatu pemerintahan yang efisien, efektif dengan adanya akses untuk mendapatkan informasi yang lebih luas kepada *public* serta meningkatkan akuntabilitas pemerintahan terhadap masyarakat. Bentuk produk *e-government* untuk meningkatkan pelayanan *public* dan umpan balik yakni adanya *website*. Melalui adanya *website* ini dapat diharapkan tercapainya penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, efektif, dan transparan. Serta pemerintahan bisa menyampaikan informasi kepada sesama pemerintahan, masyarakat, ataupun para pelaku bisnis (Cheisviyanny dkk, 2018).

Website

Terdapat beberapa kriteria dalam menilai kualitas pelayanan *e-government* melalui *website* yang mana menunjukkan apakah pelayanan yang diberikan baik atau buruk, berkualitas atau tidak. Berdasarkan Kementerian Komunikasi dan Informatika yakni penilaian fitur selang pandang, pemerintahan daerah, geografi, peta wilayah dan sumber daya, kebijakan daerah serta berita atau buku tamu. Menurut Peraturan Inpres Nomor 3 Tahun 2003 *website* dikatakan berkualitas jika sama dengan prinsip *good governance* yaitu Transparansi, Akuntabilitas, Efektivitas dan Efisiensi (Cheisviyanny et al., 2018).

- a. *Transparansi*
Adalah salah satu prinsip *good governance*. Prinsip ini dibangun agar masyarakat atau *public* bisa memperoleh informasi dengan kebebasan. Dimana bisa membantu mereka yang sedang membutuhkan.
 - b. *Akuntabilitas*
Pemerintahan pusat maupun daerah harus bisa memenuhi hak-hak *public* antaralain hak untuk diberika informasi, hak untuk tahu, dan hak untuk memerikan aspirasi. Adapun kriteria prinsip akuntabilitas yakni : Laporan APBD, Laporan Dana Hibah dan Bantuan Sosial, Penyajian Laporan Keuangan yang tepat, serta Opini Audit dari BPK (Cheisviyanny dkk, 2018).
 - c. *Efektivitas dan Efisiensi*
Efektivitas merupakan suatu hasil dalam pembuatan keputusan, membuat sesuatu yang benar, serta membantu tercapainya misi suatu perusahaan. Sedangkan efisiensi adalah bagaimana tercapainya tujuan tersebut, dibandingkan dengan usaha, pengorbanan, serta biaya yang dikeluarkan (Yousif dkk, 2018)
- Berdasarkan Kementerian Komunikasi dan Informatika, *website* dikatakan berkualitas jika terdapat :
1. Selang Pandang; berkaitan dengan eksistensi pemerintah antara lain terkait dengan sejarah, simbol, arti dari simbol, motto, bentuk peta, visi dan misi
 2. Pemerintahan Daerah; berkaitan dengan suatu struktur organisasi di suatu tempat atau daerah.
 3. Geografis; menjelaskan mengenai cuaca, iklim, topografi, demografi
 4. Peta Wilayah dan Sumber Daya; mengenai batas-batas administrasi pada wilayah, kekayaan sumber daya yang dimiliki suatu daerah.
 5. Peraturan atau kebijakan daerah; menjelaskan mengenai peraturan daerah yang telah dibuat
 6. Berita atau Buku Tamu; tempat aspirasi dari pengguna situs *website* tersebut.

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis penelitian yang dipakai adalah deskriptif – interpretif yaitu penelitian yang memiliki tahapan mendeskripsikan, menginterpretasikan serta menguraikan permasalahan dan mengambil keputusan dari permasalahan yang ada (Cheisviyanny dkk, 2018). Penelitian ini dilakukan untuk menganalisa kualitas *website* pada pemerintahan kabupaten di Pulau Flores yakni Kabupaten Manggarai, Manggarai Barat, Manggarai Timur, Flores

Timur, Ende, Nagekeo, Ngada dan Sikka berdasarkan data dari *website* masing-masing kabupaten yang ada di internet. Metode dalam pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi, berupa data *website* dari InfoASN.id

Pengukuran yang dipakai pada penelitian ini yakni menggunakan metode skor dengan alat bantu yang disediakan Web Dev / Measure page quality (<https://web.dev/measure/>). Situs Web Dev adalah suatu alat bantu atau tempat untuk mengukur:

1. *Performance*; Suatu kinerja atau prestasi dari yang dicapai dari tampilan / tindakan. Pada penelitian ini dalam hal tampilan dari masing-masing *website* pemerintahan.
2. *Accessibility*; Suatu cara untuk memudahkan public untuk mendapatkan apa yang diinginkan

atau suatu kemudahan yang bisa dicapai oleh semua orang, khususnya penderita disabilitas mengenai pelayanan, objek dan sebagainya.

3. *Best Practices* memastikan bahwa aplikasi web telah mengikuti aturan dan penerapan praktik yang terbaik.
4. SEO (*search engine optimization*) adalah teknik / cara agar mendapatkan peringkat teratas dalam hal pencarian di google. Dengan adanya SEO, maka orang akan mudah menemukannya dan berpengaruh pada peningkatan *traffic*.

Menentukan skor 0 – 100% untuk menilai kualitas keseluruhan dari halaman web dengan penilaian sesuai tabel berikut :

Tabel 2. Tingkat Penilaian

Skor (%)	Penilaian
90 - 100	Berkualitas
50 – 89	Cukup Berkualitas
0 - 49	Kurang Berkualitas

(Sumber :Cheisviyanny dkk, 2018)

Tahap-tahap penelitian dalam menggunakan Measure Page Quality adalah :

1. Langkah awal membuka halaman *website* Measure page quality
2. Masukkan URL situs yang telah tersedia untuk melihat seberapa baik kualitasnya dengan menekan run audit.
3. Menunggu proses hingga hasil skor terlihat.
4. Jika sudah maka pada bagian bawah terdapat skor dari hasil cek *website* tersebut, terlihat contoh pada gambar 1.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berikut merupakan hasil dari penilaian *website* 8 Kabupaten di Pulau Flores dengan penilaian menggunakan Web Dev / Measure page quality (<https://web.dev/measure/>). Dalam bentuk persentase %.

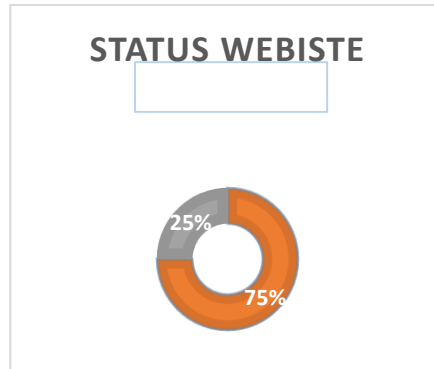
Tabel 3. Hasil Penelitian

(dalam bentuk %)

Kecamatan	Penilaian			
	Performance	Accessibility	Best Practices	SEO
Manggarai Timur	14	58	69	98
Manggarai Barat	79	81	85	100
Manggarai	18	72	69	89
Nagekeo	-	-	-	-
Ngada	-	-	-	-
Ende	85	70	69	100
Sikka	65	87	53	74
Flores Timur	81	81	69	92

(Sumber : Penulis, 2021)

Dari hasil penelitian yang dilakukan terhadap 8 kabupaten di Pulau Flores NTT, terdapat 2 website yang tidak bisa diproses atau eror ketika dilakukan pengecekan yakni website Pemerintahan Kabupaten Ngada dan Nagekeo. Untuk 6 website pemerintahan lainnya bisa di akses dengan lancar. Berikut persentase status website 8 Kabupaten di Pulau Flores :

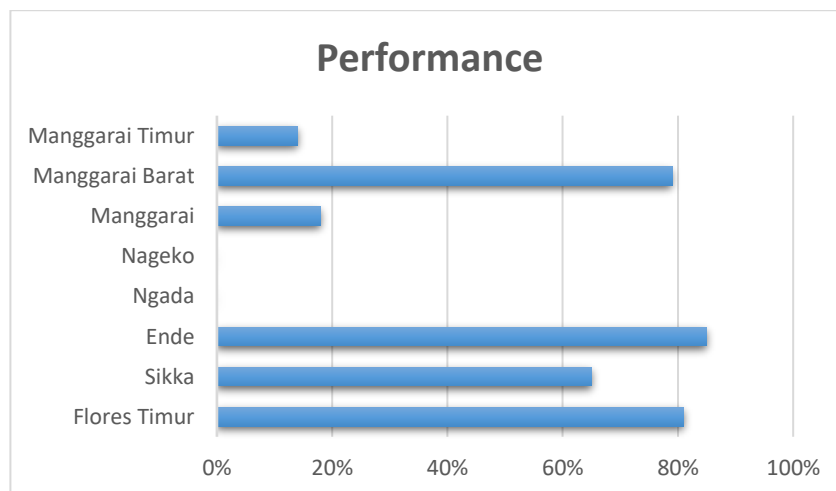


Gambar 1. Status Website

Pembahasan Performance

Melalui alat bantu Web Dev / Measure page quality, terdapat penilaian untuk *Performance* ditandai dengan persentase dari masing-masing website. *Performance* merupakan suatu kinerja atau prestasi dari yang dicapai dari tampilan / tindakan. Dimana, dalam *Performance* suatu website disarankan agar gambar yang disajikan dalam format yang baik, mengurangi hal-hal yang kurang penting, memastikan teks yang ditampilkan mudah dibaca oleh public. Pada penelitian ini dalam hal tampilan

dari masing-masing website pemerintahan. Dari hasil (Gambar 2) diperoleh website Pemerintahan Kabupaten Ende memiliki persentase tertinggi yakni 85% disusul Flores Timur yang tidak jauh berbeda yakni 81% disusul Manggarai Barat lalu Sikka. Empat Kabupaten ini penilaian nya yakni cukup berkualitas. Sedangkan untuk Kabupaten Manggarai 18% dan Manggarai Timur 14% masuk dalam kategori kurang berkualitas. Sehingga untuk Kabupaten Manggarai dan Manggarai Timur perlu ditingkatkan lagi seperti bentuk penyajian gambar, sumber daya yang ada perlu ditampilkan dari setiap kabupaten.

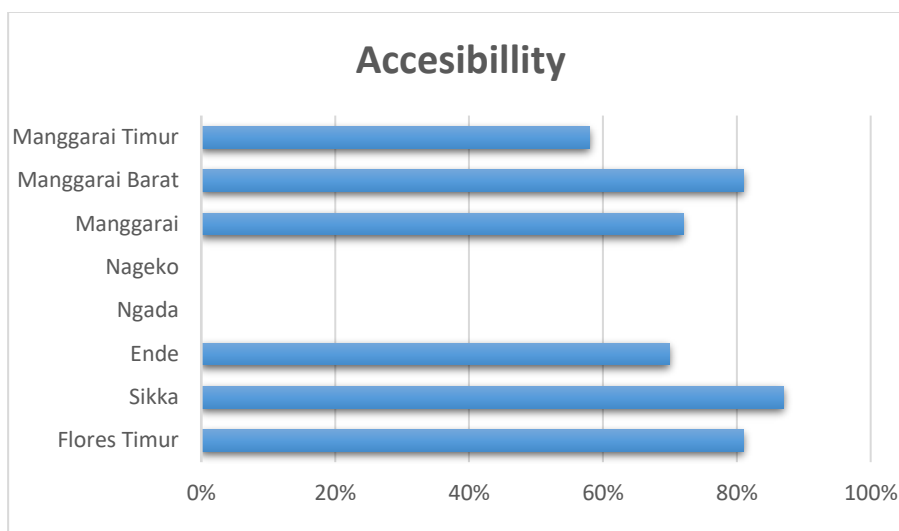


Gambar 2. Performance Website Pemerintahan Kabupaten di Pulau Flores

Accessibility

Accessibility merupakan suatu cara untuk memudahkan public mendapatkan apa yang diinginkan atau suatu kemudahan yang bisa dicapai oleh semua orang khususnya pengguna yang memiliki keterbatasan mengenai pelayanan, objek dan sebagainya. *Accessibility* merupakan suatu peluang untuk meningkatkan interpetasi kualitas website setiap kabupaten oleh pengguna di berbagai tempat. Semua kabupaten yang diteliti masuk dalam kategori cukup

berkualitas dengan persentase yang tidak jauh berbeda yakni Kabupaten Sikka 87%, kemudian Flores Timur dan Manggarai Barat yang sama-sama memiliki persentase 81%, Manggarai 72%, Ende 70%, disusul persentase paling rendah yaitu Manggarai Timur yaitu 58%. Secara umum dari enam kabupaten yang diteliti *Accessibility* dari masing-masing website sudah cukup berkualitas. Namun perlu ditingkatkan lagi untuk *Accessibility* terkait dengan pelayanan pemerintahan yang diberikan lewat website tersebut.

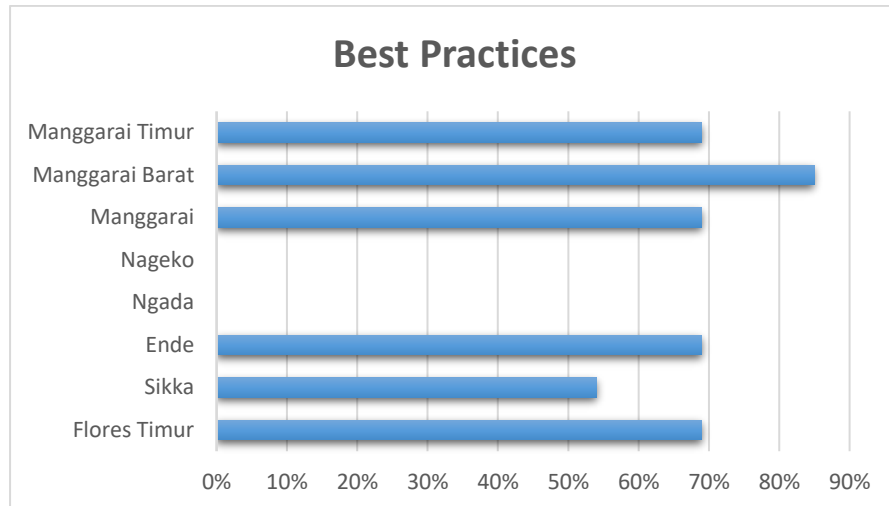


Gambar 3. Accesibility Website Pemerintahan Kabupaten di Pulau Flores

Best practices

Google mempunyai berbagai aturan terhadap setiap web yang akan di indeks. *Best practices* memiliki fungsi untuk memastikan apakah aplikasi web telah mengikuti aturan dan penerapan praktik yang terbaik. Fitur ini dapat membantu pengguna menghindari kinerja yang gagal dan memodernisasi website tersebut. Persentasi tertinggi untuk *best*

practices (Gambar 4) dalam penelitian ini, yaitu Manggarai Barat sebesar 85% dimana suatu *website* memiliki karakteristik diantaranya mampu menjadi pemberi informasi dan inspirasi kepada *public*. Disusul 3 kabupaten yaitu Flores Timur, Ende, Manggarai, dan Manggarai Timur yang memiliki persentasi 69%. Kemudian paling rendah yaitu Kabupaten Sikka.

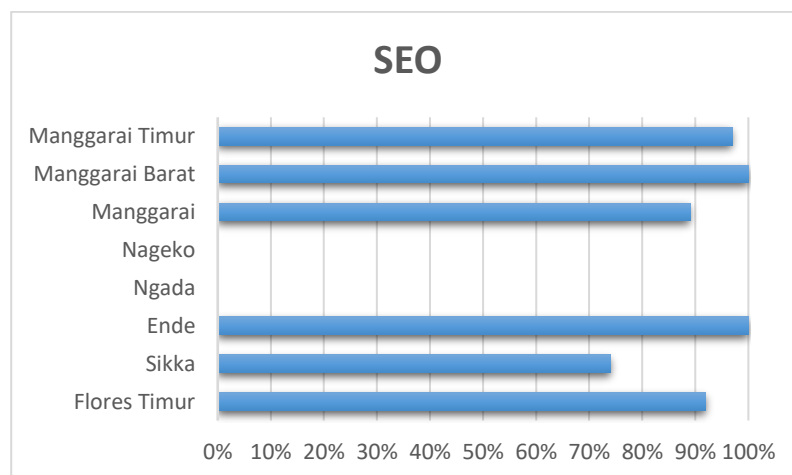


Gambar 4. Best Practices Pemerintahan Kabupaten di Pulau Flores

Search Engine Optimization (SEO)

SEO (*search engine optimization*) merupakan teknik / cara agar mendapatkan peringkat teratas dalam hal pencarian di google. Dengan adanya SEO, maka pengguna / public akan mudah menemukan hasil pencarian dan berpengaruh pada peningkatan traffic. Hal ini sangat penting apabila aplikasi web diharapkan bisa mendapatkan banyak pengunjung. Dalam penelitian ini, untuk SEO atau *search engine optimization* (Gambar 5) Kabupaten Ende, Manggarai

Barat, Manggarai Timur, serta Flores Timur masuk dalam penilaian berkualitas dimana pada sistem pencarian di google berada pada posisi pencarian teratas yang juga berpengaruh pada peningkatan *traffic* atau jumlah orang yang mengunjungi website tersebut. Untuk Kabupaten Manggarai dan Sikka harus perlu diperhatikan lagi agar *public* tidak kesusahan dan lebih memudahkan dalam mencari website pemerintahan.



Gambar 5. SEO Pemerintahan Kabupaten di Pulau Flores

KESIMPULAN

Penelitian ini melakukan analisis kualitas *website* pada 8 Kabupaten di Pulau Flores NTT. Website yang bisa diakses yakni 6 website sedangkan 2 website lainnya eror. Alat ukur yang digunakan adalah Web Dev / Measure page quality (<https://web.dev/measure/>). Dari hasil penelitian

tersebut diperoleh rata-rata untuk *Performance* adalah 57%. Rata-rata untuk *Accessibility* 74%. Untuk *Best Practices*, rata-rata diperoleh 69% yang mana masuk dalam kategori cukup berkualitas. Sedangkan untuk SEO berada pada tingkat penilaian berkualitas dengan persentase rata-rata 92%. Rendahnya kualitas website dari masing-masing pemerintahan

mempengaruhi ketertarikan *public* untuk mendapatkan suatu informasi. Sehingga perlu adanya perbaikan kembali.

Rekomendasi

Saran yang bisa diberikan adalah harus ditingkatkan lagi kinerja *website* agar dapat memberikan kualitas yang baik kepada *public* untuk bisa menjadi tempat mendapatkan informasi yang dibutuhkan dan aspirasi *public*. Untuk 2 *website* pemerintahan yakni Kabupaten Ngada dan Nagekeo yang tidak bisa diakses atau eror agar dapat diperbaharui kembali.

DAFTAR PUSTAKA

- Adriana, A. (2017). Analisis Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Berbasis Website Pada Pemerintah Daerah Se-Jawa. *Accounting and Business Information Systems Journal*, 6(1), 157–167.
- Astuti, S. I., Arso, S. P., & Wigati, P. A. (2015).. *Analisis Standar Pelayanan Minimal Pada Instalasi Rawat Jalan Di RSUD Kota Semarang*, 3, 103–111.
- Cheisviyanny, C., Helmy, H., & Dwita, S. (2018). Analisis Kualitas Website Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat. *Simposium Nasional Keuangan Negara*, 6(3), 1087–1104.
- Condro Laksono, Sasano Wibowo SE, M. K. (2014). Analisis Website Kpu Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Sistem Informasi*, 4.
- Diana, J., & Webqual, M. (2014). Analisis Website E-government Provinsi Bengkulu Menggunakan Webqual 4.0. *Jurnal Informatika Darmajaya*, 14(2), 202–212.
- Marthasari, G. I., & Ismadiani, G. (2020). Evaluasi kinerja web pemerintah provinsi di Indonesia. *Sentra* 2020.
- Masyhur, F. (2014). Kinerja Website Resmi Pemerintah Provinsi di Indonesia. *Pekommas*, 17(1), 9–14.
- Sitokdana, M. N. N. (2015). Evaluasi Implementasi eGovernment Pada Situs Web Pemerintah Kota Surabaya, Medan, Banjarmasin, Makassar dan Jayapura. *Jurnal Buana Informatika*, 6(4), 289–300.
- Sosiawan, E. A. (2008). Evaluasi Implementasi E-Government pada Situs Web Pemerintah Daerah di Indonesia: Prespektif Content Dan Manajemen. *Seminar Nasional Informatika*, 2008(November 2007), 88–98.
- Sulaiman, A. H., Aryadita, H., & Pinandito, A. (2017). Evaluasi Kualitas Layanan Website Pemerintah Kota Batu Dengan Metode E-Govqual Dan Importance Performance Analysis (IPA), 493–502.
- Sulistiyo, D., Negara, H. P., Firdaus, Y., Bidang, K., Rekayasa, K., Lunak, P., & Data, D. (2008). UPN “Veteran” Yogyakarta. *Seminar Nasional Informatika*, 2008(semnasIF), 55–62.